



# LAKIP

**(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)  
TAHUN 2018**



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

## ***Kata Pengantar***

**P**uji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmatNya sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP ) tahun 2018.

LAKIP tahun 2018 ini merupakan Laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama tahun 2018. LAKIP ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada. Informasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat menjadi referensi umum bagi Dinas Pendidikan Provinsi NTT maupun semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus sebagai evaluasi kinerja masa kerja Dinas Pendidikan selama Tahun 2018. Dalam laporan ini diuraikan mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pendidikan yang bersifat operasional dengan dukungan pembiayaan dari APBD I Tahun Anggaran 2018 dan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018. Dengan dukungan alokasi anggaran tersebut, proses pembangunan di bidang pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 dan Renstra Dinas Tahun

2013 – 2018. Hal tersebut dapat terbaca di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Pendidikan Provinsi NTT telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan pada masing-masing program pembangunan pendidikan dengan baik. Tantangan pembangunan pendidikan di Provinsi NTT masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan di wilayah ini. Walaupun demikian kami optimis bahwa dengan dukungan dari semua pihak, pelbagai tantangan dan masalah dalam mencapai target sebagaimana yang telah kami tetapkan di dalam Renstra dapat terwujud dengan baik.

Akhirnya melalui laporan ini kami berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan di Provinsi NTT secara menyeluruh pada tahun 2018. Selain itu laporan ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan di Provinsi NTT pada tahun-tahun mendatang.

Kupang, Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>14</b>
A. Capaian Kinerja Sasaran .....	14
B. Akuntabilitas Keuangan .....	28
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi Pegawai Tahun 2018 .....	7
Tabel 1.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	8
Tabel 1.3.	Komposisi PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2018 .....	8
Tabel 1.4.	Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2018 .....	9
Tabel 1.5	Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun 2018 .....	9
Tabel 2.1.	Alokasi Anggaran APBD Tahun 2018 .....	11
Tabel 2.2.	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 .....	13
Tabel 3.1	Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat Usia Sekolah pada semua Jenis dan Jenjang .....	16
Tabel 3.2	Sasaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan Berkelanjutan .....	24
Tabel 3.3	Sasaran Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus .....	26
Tabel 3.4	Sasaran Peningkatan Tata Kelola Pendidikan yang Efektif dan Efisien .....	27
Tabel 3.6	Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2018 .....	29
Tabel 3.7	Alokasi dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2018 .....	34

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Rata-rata Nilai UN SMP Tahun 2015-2017 .....	18
Grafik 3.2.	Rata-rata Nilai UN SMA Tahun 2015-2017 .....	19
Grafik 3.3.	Rata-rata Nilai UN SMK Tahun 2015-2017 .....	19
Grafik 3.4.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	20
Grafik 3.5.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) .....	20

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya . Laporan ini memberikan gambaran tingkat keberhasilan capaian kinerja selama tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2013-2018. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dipakai sebagai acuan dalam pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Sesuai dengan Perencanaan Kinerja Tahun 2018, selama periode ini, Dinas Pendidikan menetapkan 2 (dua) misi, yakni:

<b>M1</b>	<b>Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;</b>
<b>M2</b>	<b>Meningkatkan Manajemen Pelayanan Pendidikan;</b>

Untuk mengukur pencapaian dua misi tersebut, Renstra menetapkan tiga tujuan strategis, lima sasaran strategis dengan lima program pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi NTT beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan melalui target dan pencapaiannya.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2013-2018, memuat pelbagai indikator dan target capaian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas. Uraian lebih rinci mengenai target dan capaian keberhasilannya tergambar pada Bab III dokumen ini.

Sebagaimana akan tergambar pada bab selanjutnya, hingga akhir tahun 2018, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis bidang pendidikan telah mencapai hasil yang cukup memuaskan.

Berkaitan dengan capaian kinerja yang tidak mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab kegagalan dan permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut sekaligus dapat ditemukan solusi dan menetapkan langkah-langkah perbaikan sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tujuan akhir dari seluruh capaian tersebut adalah terwujudnya visi pendidikan yakni "Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Cerdas dan Berbudaya".

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intantansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dipakai sebagai acuan dalam pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran. Sebagai penjabaran pelaksanaan AKIP di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2006 telah dikeluarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT.

Kinerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2018 sangat dipengaruhi oleh pelbagai perubahan yang terjadi, baik itu perubahan kebijakan internal lembaga, kepemimpinan, maupun perubahan paradigma perencanaan. Dinas pendidikan sendiri telah mengalami perubahan nomenkelatur pada tahun 2017 yang disebabkan oleh pengalihan wewenang dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun secara perencanaan indkator yang terdapat pada perjanjian kerja masih menggunakan rencana strategis (resntra) tahun 2013-2018.

Perubahan paradigma perencanaan pembangunan nasional dan daerah tersebut menuntut aparat pemerintahan untuk lebih profesional, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan perencanaan pada semua aspek pengelolaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan agar memenuhi kebutuhan masyarakat demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan

partisipatif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, adil dan demokratis.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), transparan dan akuntabel maka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan menjawab tuntutan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan perkembangan kondisi pelaksanaan program, kegiatan serta pembiayaan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan selama tahun 2018 melalui media pertanggungjawaban kinerja (*performance accountabilities*) Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan yang dihadapi atas pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013, tugas pokok Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah ***membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan.***

Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;

- d. Pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala, kemudian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, (empat) Kepala Bidang dengan 12 (dua belas) Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah). Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
  - 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - 3) Kepala Sub Bagian keuangan.
- c) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, membawahkan:
  - 1) Kepala Seksi Kurikulum;
  - 2) Kepala Seksi Kesiswaan;
  - 3) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- d) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, membawahkan:
  - 1) Kepala Seksi Kurikulum;
  - 2) Kepala Seksi Kesiswaan;

- 3) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- e) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Kurikulum;
    - 2) Kepala Seksi Kesiswaan;
    - 3) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
  - f) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMA;
    - 2) Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMK;
    - 3) Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PKLK.
  - g) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).

Disamping itu pada Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 12 (duabelas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan dengan susunan sebagai berikut :

- a) Kepala UPT. Tekomdik, membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Kepala Seksi Teknologi Informasi;
  - 3) Kepala Seksi Teknologi Pembelajaran.
- b) Kepala UPT. Wilayah I (Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS), membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Kepala Seksi SMA;
  - 3) Kepala Seksi SMK dan PKLK;
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).
- c) Kepala UPT. Wilayah II (Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka), membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- 2) Kepala Seksi SMA;
  - 3) Kepala Seksi SMK dan PKLK;
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).
- d) Kepala UPT. Wilayah III (Kab. Rote Ndao), membawahkan:
- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Kepala Seksi SMA;
  - 3) Kepala Seksi SMK dan PKLK;
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).
- e) Kepala UPT. Wilayah IV (Kab. Sabu Raijua), membawahkan:
- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Kepala Seksi SMA;
  - 3) Kepala Seksi SMK dan PKLK;
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).
- f) Kepala UPT. Wilayah V (Kab. Alor), membawahkan:
- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Kepala Seksi SMA;
  - 3) Kepala Seksi SMK dan PKLK;
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).
- g) Kepala UPT. Wilayah VI (Kab. Lembata), membawahkan:
- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Kepala Seksi SMA;
  - 3) Kepala Seksi SMK dan PKLK;
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).
- h) Kepala UPT. Wilayah VII (Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur), membawahkan:
- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Kepala Seksi SMA;
  - 3) Kepala Seksi SMK dan PKLK;
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).

- i) Kepala UPT. Wilayah VIII (Kab. Ende, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada), membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Kepala Seksi SMA;
  - 3) Kepala Seksi SMK dan PKLK;
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).
- j) Kepala UPT. Wilayah IX (Kab. Sikka, Kab. Flores Timur), membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Kepala Seksi SMA;
  - 3) Kepala Seksi SMK dan PKLK;
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).
- k) Kepala UPT. Wilayah X (Kab. Sumba Timur), membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Kepala Seksi SMA;
  - 3) Kepala Seksi SMK dan PKLK;
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).
- l) Kepala UPT. Wilayah XI (Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah), membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Kepala Seksi SMA;
  - 3) Kepala Seksi SMK dan PKLK;
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).

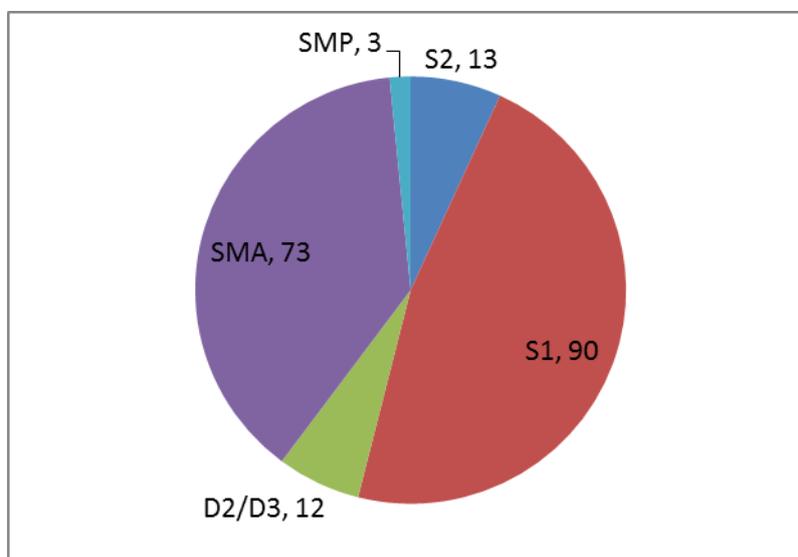
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur didukung oleh sumber daya manusia/personil sebanyak 299 orang, terdiri dari 191 orang pegawai negeri sipil (PNS), dan 108 orang tenaga kontrak (honorar). Komposisi personil dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Tahun 2018

No	URAIAN	PNS		CPNS		HONORER		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat	37	12	-	1	12	26	87
2	Bidang Pembinaan PKLK	8	3	-	-	6	7	24
3	Bidang Pembinaan SMA	11	3	-	-	5	3	22
4	Bidang Pembinaan SMK	5	7	-	-	4	4	20
5	Bidang Ketenagaan	10	6	2	-	6	8	32
6	UPT. Pendidikan Wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang dan Kab. TTS	4	5	-	-	4	4	21
7	UPT. Pendidikan Wilayah Kab. TTU, Belu dan Malaka	3	4	-	-	1	3	11
8	UPT. Pendidikan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	3	0	-	-	2	-	5
9	UPT. Pendidikan Wilayah Kabupaten Sabu Raijua	4	0	-	-	1	-	5
10	UPT. Pendidikan Wilayah Kabupaten Alor	4	0	-	-	1	-	5
11	UPT. Pendidikan Wilayah Kabupaten Lembata	3	0	-	-	-	1	4
12	UPT. Pendidikan Wilayah Kabupaten Sikka dan Flores Timur	4	0	-	-	3	-	7
13	UPT. Pendidikan Wilayah Kabupaten Ende, Nagekeo dan Ngada	5	3	-	-	3	-	7
14	UPT. Pendidikan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat	3	3	-	-	2	1	9
15	UPT. Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	4	1	-	-	2	-	7
16	UPT. Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya	4	0	-	-	1	2	7
17	UPT Tekkomdik	5	4	-	-	-	2	11
18	SKO	0	1	-	-	10	3	14
19	Kelompok Jabatan Fungsional:							
	▪ Arsiparis	1	0	-	-	-	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>126</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>299</b>

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Desember 2018

Gambar. 1.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS  
Tahun 2018



Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Desember 2018

Tabel 1.2  
Komposisi PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan  
Tahun 2018

PANGKAT GOLONGAN	L	P	JUMLAH
Pembina Utama Madya (IV/d)	0	1	1 Orang
Pembina Tingkat I (IV/b)	3	1	4 Orang
Pembina (IV/a)	10	4	14 Orang
Penata Tingkat I (III/d)	25	9	34 Orang
Penata (III/c)	12	9	21 Orang
Penata Muda Tingkat I (III/b)	28	20	48 Orang
Penata Muda (III/a)	10	7	17 Orang
Pengatur Tingkat I (II/d)	5	1	6 Orang
Juru (II/c)	17	5	22 Orang
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	8	6	14 Orang

<b>PANGKAT GOLONGAN</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>JUMLAH</b>
Pengatur Muda (II/a)	5	2	7 Orang
Juru Tingkat I (I/d)	2	0	2 Orang
Juru (I/c)	1	0	1 Orang
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>	<b>65</b>	<b>191 Orang</b>

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Desember 2018

Tabel 1.3  
Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural  
Tahun 2018

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>TOTAL</b>
			<b>L</b>	<b>P</b>	
1	Kepala Dinas	II A	0	1	1
2	Sekretaris	III A	1	0	1
3	Kepala Bidang	III A	3	0	3
4	Kepala UPT	III B	10	2	11
5	Kepala Seksi	IV A	29	17	46
6	Fungsional: ▪ Arsiparis	-	1		1
7	Staf	-	73	32	105
<b>TOTAL</b>			<b>48</b>	<b>20</b>	<b>173</b>

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Desember 2018

Selain personil Dinas Pendidikan juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang dimiliki berupa aktiva tanah dan bangunan (barang tidak bergerak), inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya (barang bergerak) dengan berbagai kondisi. Secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4  
Rekapitulasi Kartu Inventaris  
Tahun 2018

No.	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Kondisi 1 Januari 2018			Penyusutan 2018	Mutasi BMD per 31 Desember 2018								Nilai Aset Tetap 31 Desember 2018		
		Aset Tetap (Nilai Perolehan)	Akumulasi Penyusutan	Aset Tetap (Nilai Buku)		Bertambah					Berkurang			Aset Tetap (Nilai Perolehan)	Akumulasi Penyusutan	Aset Tetap (Nilai Buku)
						Belanja Modal dan DAK	Dana BOS	P2D	Hibah Pusat	Kapitalisasi	Jumlah	Kapitalisasi	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8			10	12=7+8+9+10+11	16	18=13+14+15+16+17	19=3+12-18	20	21
<b>I</b>	<b>ASET TETAP</b>															
a	Tanah	75.954.480.000,00		75.954.480.000,00				71.945.867.046,00		-	71.945.867.046,00	-	-	147.900.347.046,00	-	147.900.347.046,00
b	Mesin dan Peralatan	48.878.864.317,00	2.794.549.600,00	46.084.314.717,00	9.516.998.063,40	32.652.989.754,00	35.710.314.633,00	151.414.703.970,68	16.882.200.000,00		236.660.208.357,68		-	285.539.072.674,68	12.311.547.663,40	273.227.525.011,28
c	Gedung dan Bangunan	69.278.931.322,33	6.395.228.082,47	62.883.703.239,86	1.478.633.164,58	55.878.119.197,00		627.182.916.764,74			683.061.035.961,74		-	752.339.967.284,07	7.873.861.247,05	744.466.106.037,02
d	Jaringan	4.323.556.668,00	1.746.467.470,00	2.577.089.198,00	312.310.510,90			3.072.366.788,00			3.072.366.788,00		-	7.395.923.456,00	2.058.777.980,90	5.337.145.475,10
e	Aset Tetap Lainnya	29.790.206.216,00	175.720.000,00	29.614.486.216,00	5.824.639.243,20	1.527.213.000,00	35.988.440.254,00	25.417.944.343,68			62.933.597.597,68		-	92.723.803.813,68	6.000.359.243,20	86.723.444.570,48
f	Konstruksi Dalam Pekerjaan	-	-	-	-			19.857.047.636,10			19.857.047.636,10		-	19.857.047.636,10	-	19.857.047.636,10
	Jumlah I .....	228.226.038.523,33	11.111.965.152,47	217.114.073.370,86	17.132.580.982,08	90.058.321.951,00	71.698.754.887,00	898.890.846.549,20			1.077.530.123.387,20		-	1.305.756.161.910,53	28.244.546.134,55	1.277.511.615.775,98
<b>II</b>	<b>ASET LAINNYA</b>															
a	Aset Rusak Berat	3.200.680.050,00	-	-	-	-	-	4.620.164.110,00			7.820.844.160,00		-	7.820.844.160,00		
b	Aset di Bawah Nilai Kapitalisasi	2.291.878.347,00	-	-	-	-	-	-			2.291.878.347,00		-	2.291.878.347,00		
c	Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-		
d	OPD	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-		
	Jumlah II .....	5.492.558.397,00	-	-	-	-	-	-			-		-	10.112.722.507,00		
	<b>TOTAL I + II .....</b>	<b>233.718.596.920,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.315.868.884.417,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Desember 2018

## BAB. II

### PERENCANAAN KINERJA

Mengacu pada rencana strategis tahun 2013-2018, Dinas Pendidikan telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2018. Perjanjian kinerja berisikan target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2018. Target tersebut merupakan pentahapan pencapaian kinerja selama lima tahun kedepan, di mana tahun 2018 merupakan tahun kelima dalam rencana jangka menengah Dinas Pendidikan.

Pada tahun 2017 Dinas pendidikan sendiri telah mengalami perubahan nomenkelatur sehingga tidak semua indikator yang terdapat dalam renstra diakomodir dalam perjanjian kinerja tahun 2018. Dalam mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.177.311.719.000,- dengan pembiayaan terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.702.963.364.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 474.348.355.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Alokasi Anggaran APBD Tahun 2018

No.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)
*	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>702.963.364.000</b>
*	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>474.348.355.000</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG NON URUSAN OPD</b>	<b>9.145.951.967</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>7.917.771.967</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.795.000
2	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	912.600.000
3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	30.000.000
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	53.040.000
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.136.156.000

No.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)
6	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	610.410.000
7	Penyediaan alat tulis kantor	566.417.695
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	396.900.000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	349.735.000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.800.000
11	Penyediaan makan dan minuman	213.600.000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	70.000.000
13	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	27.666.000
14	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	617.230.000
15	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	124.940.000
16	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	1.730.482.272
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.169.000.000</b>
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	420.950.000
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	144.750.000
4	Pengadaan Meubeleu	118.700.000
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	130.500.000
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Operasional	170.000.000
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	16.800.000
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	167.300.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>59.180.000</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.180.000
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM</b>	<b>465.202.403.033</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN</b>	<b>453.197.478.043</b>
1	Rehap Gedung Sekolah	132.831.000.000
2	Pembinaan Minat. Bakat. dan Kreativitas Siswa	3.933.958.400
3	Pengadaan Peralatan Pendukung UN Online (UNBK)	5.990.120.000
4	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	2.192.016.582
5	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.675.796.000
6	Pembinaan Kelompok Kerja dan Musyawarah guru maple (MGMP)	2.078.100.000

No.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)
7	Fasilitasi ujian SLB sederajat/setara	1.443.747.500
8	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah	254.188.535.961
9	Pengembangan system penghargaan dan perlindungan	46.035.200.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.740.213.182</b>
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	1.740.213.182
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN LUAR BIASA</b>	<b>10.264.711.808</b>
1	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	769.506.708
2	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	1.257.030.500
3	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SLB	3.201.117.100
4.	Peningkatan mutu Sekolah keberbakatan olahraga	5.037.057.500
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.177.311.719.000</b>

Alokasi anggaran tersebut di atas dialokasikan untuk merealisasikan 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pendidikan tahun 2018.

Tabel 2.2  
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3
S1	Peningkatan mutu pendidikan masyarakat usia sekolah pada semua jenis dan jenjang	1 Perentase Angka Kelulusan untuk setiap Jenjang Pendidikan:	
		- SD	100 %
		- SMP	100 %
		- SMA	100 %
		- SMK	100 %
		2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	
		- 0 - 6 tahun	34,5 %
		- 7 - 12 tahun	100 %
		- 13 - 15 tahun	99 %
		- 16 - 18 tahun	95 %
3 Rata-Rata lama usia sekolah	8,5 %		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3
S2	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan berkelanjutan	Perentase Penurunan Angka Buta Huruf	4 %
S3	Peningkatan akses layanan pendidikan khusus dan layanan khusus	APK PLB	22 %
S4	Peningkatan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien	Frekuensi koordinasi perencanaan, supervisi, monitoring dan evaluasi	47 Kali

### BAB. III

## AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NTT

#### A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sesuai dengan target kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja yang meliputi capaian dari penetapan kinerja Kepala Dinas dengan Gubernur dalam bidang pendidikan.

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja secara prosedural dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan asumsi berpikir sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran, yakni menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerja, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.

Penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, baik untuk masing-masing indikator kinerja maupun untuk capaian pada tingkat sasaran, dengan kriteria atau tolok ukur penilaian sebagai berikut:

<b>X</b>	<b>≥85 %</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b>70 %</b>	<b>≤ X &lt; 85 %</b>	<b>Berhasil</b>
<b>55 %</b>	<b>&lt; X &lt; 70 %</b>	<b>Cukup Berhasil</b>
<b>X</b>	<b>≤ 55 %</b>	<b>Belum Berhasil</b>

Berdasarkan tabel kriteria capaian tersebut di atas, berikut ini gambaran capaian kinerja dari masing-masing sasaran sebagai bentuk keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

**SASARAN 1 :**

Tabel 3.1  
Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat Usia Sekolah pada semua Jenis dan Jenjang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018		Capaian (%)
							Target	Realisasi	
1	Persentase Angka Kelulusan untuk setiap Jenjang Pendidikan:								
	❖ SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100,00
	❖ SMP/MTs	%	99,89	100	100	100	100	100	100,00
	❖ SMA/MA	%	99,00	100	100	100	100	100	100,00
	❖ SMK	%	99,12	100	100	100	100	100	100,00
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS):								
	❖ 0 – 6 Tahun	%	27,71	28,00	29,5	36,88	32,5	36,70	112,92
	❖ 7 – 12 Tahun	%	96,21	96,68	96,85	99,77	99	99,81	100,82
	❖ 13 – 15 Tahun	%	94,89	93,37	97,99	97,19	98	99,65	101,68
	❖ 16 – 18 Tahun	%	8010	87,02	87,99	98,01	93	98,15	105,54
3	Rata-rata lama Usia Sekolah	Tahun	6,6	6,6	7,5	7,7	8	7,7	96,25
<b>Rata-rata</b>									<b>101,08</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat Usia Sekolah pada semua Jenis dan Jenjang adalah **101,91** atau dikategorikan **sangat berhasil**.

### 1. Persentase Angka Kelulusan untuk setiap Jenjang Pendidikan

Berdasarkan capaian indikator kinerja yang terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi persentasi angka kelulusan mencapai target yang telah ditetapkan. Secara kuantitas capaian indikator 100%. Hal ini menandakan bahwa adanya keberhasilan dalam persentasi kelulusan. Namun secara kualitas hasil yang didapat masih perlu menjadi perhatian khusus. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa rata-rata nilai ujian nasional SMP pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 naik 0,45 poin. Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1.3 poin dari tahun

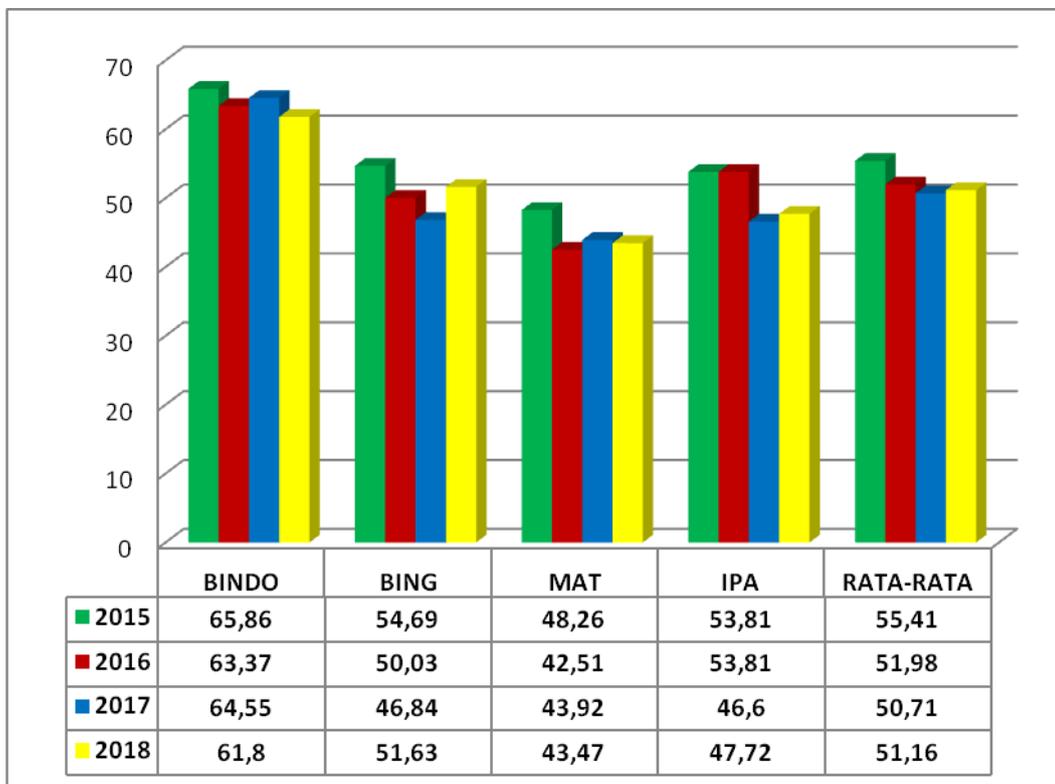
2016 dan 4.7 poin dari tahun 2015, untuk jenjang SMA mengalami kenaikan sebesar 4.9 poin dari tahun 2016 dan 0.3 poin dari tahun 2015 sedangkan untuk jenjang SMK mengalami penurunan sebesar 3.6 poin dari tahun 2016 dan 4.9 poin dari tahun 2015. Hal ini menjadi perhatian yang serius dan perlu dilakukan pengkajian terkait penurunan tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah Ujian Nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan, karenanya mempengaruhi motivasi belajar peserta didik.

Pada dasarnya kelulusan ditentukan oleh sekolah mulai tahun 2015. Dengan demikian, siswa dengan nilai UN rendah dapat dinyatakan lulus oleh sekolah sepanjang yang bersangkutan telah mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya penentuan kelulusan siswa oleh Nilai Ujian Nasional, Nilai Rapor dan Nilai Ujian Sekolah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan melihat persebaran nilai Ujian Nasional, Provinsi NTT dinyatakan memiliki indkes integritas atau indkes kejujuran di atas rata-rata atau tergolong baik atau dengan kata lain hasil ujian Nasional di Nusa Tenggara Timur relatif bebas dari kecurangan atau relatif bersih dan jujur.

Berbagai upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau mutu lulusan antara lain: meningkatkan pengelolaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) melalui pembinaan-pembinaan program kerja yang mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) dan meningkatkan monitoring pembelajaran di kelas dengan penyusunan dan prosedur monitoring dan perangkat monitoring yang diperlukan. Selain itu proses pendidikan dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan *input* pendidikan

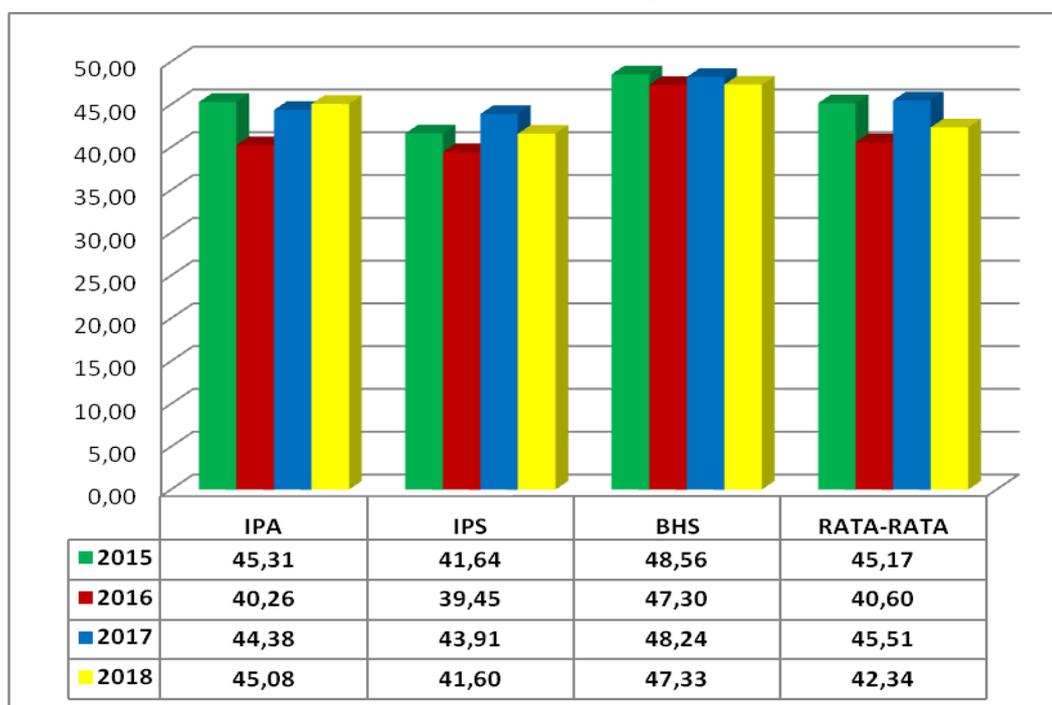
(guru, peserta didik, kurikulum, uang, peralatan dan hal-hal lain yang terkait) dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.

Grafik 3.1  
Rata-rata Nilai UN SMP Tahun 2015 -2018



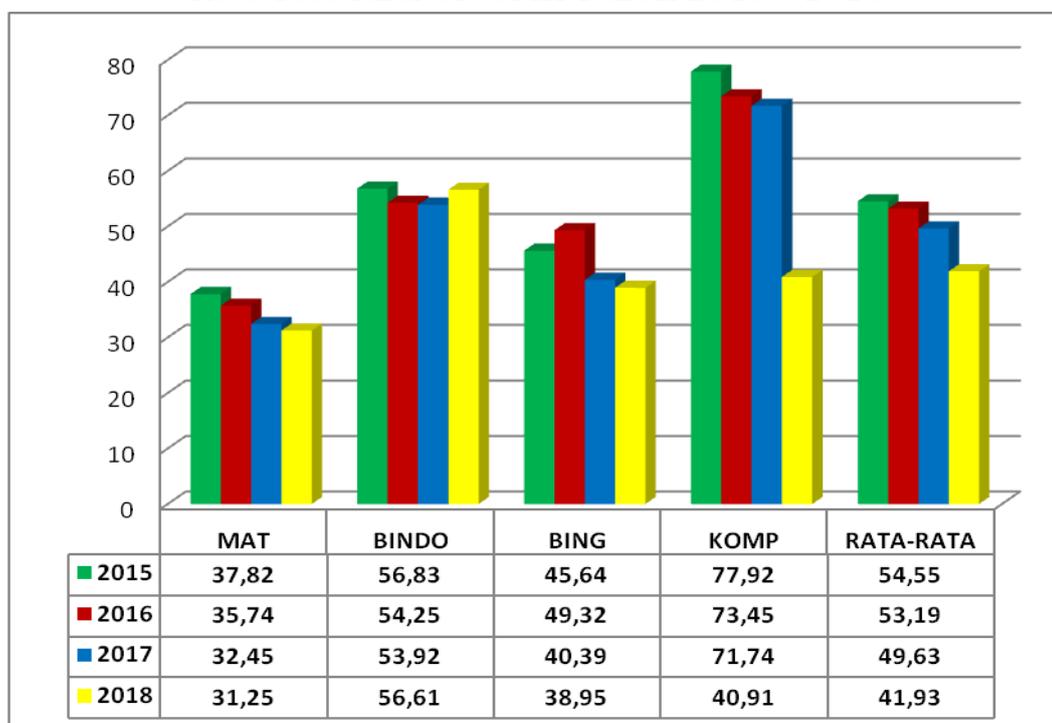
Sumber data : Sekretariat UN Dinas Pendidikan Provinsi NTT

Grafik 3.2  
Rata-rata Nilai UN SMA Tahun 2015 – 2018



Sumber data : Sekretariat UN Dinas Pendidikan Provinsi NTT

Grafik 3.3  
Rata-rata Nilai UN SMK Tahun 2015 – 2018



Sumber data : Sekretariat UN Dinas Pendidikan Provinsi NTT

Indikator kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian target dari indikator kinerja utama di atas adalah:

- a. % guru berkualifikasi minimal S1;
- b. Jumlah guru setiap jenjang pendidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi.

Dalam mendukung pencapaian indikator-indikator di atas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 antara lain:

- a. Bantuan peralatan pendukung UNBK pada 59 sekolah dengan rincian SMA 38 dan SMK 21 sekolah serta pelatihan bagi operator (proktor);
- b. Penyusunan master soal *try out* SMA dan SMK;
- c. Pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis multimedia bagi guru-guru dan manajemen kepala sekolah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- d. Peningkatkan kompetensi guru terutama guru mata pelajaran Ujian Nasional dengan melakukan pelatihan penyusunan soal UN/US dan. bimbingan teknis kurikulum;
- e. Optimalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG). Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
- f. Analisis kebutuhan dan penyebaran guru sebagai dasar redistribusi guru ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu.

Melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini secara konsisten dan terintegrasi. maka akan mendorong percepatan pencapaian target IKK dan IKU.

## 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Berdasarkan capaian indikator pada tabel 3.1 menggambarkan bahwa adanya keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan untuk indikator angka partisipasi sekolah. Indikator ini memiliki indikator yang lebih operasional sebagai berikut:

- a. APK SD, SMP, SMA, SMK;
- b. APM SD, SMP, SMA, SMK;
- c. Rasio Kelas : Siswa;
- d. Rasio Guru : Siswa.

Dalam mendukung pencapaian indikator-indikator tersebut berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 antara lain:

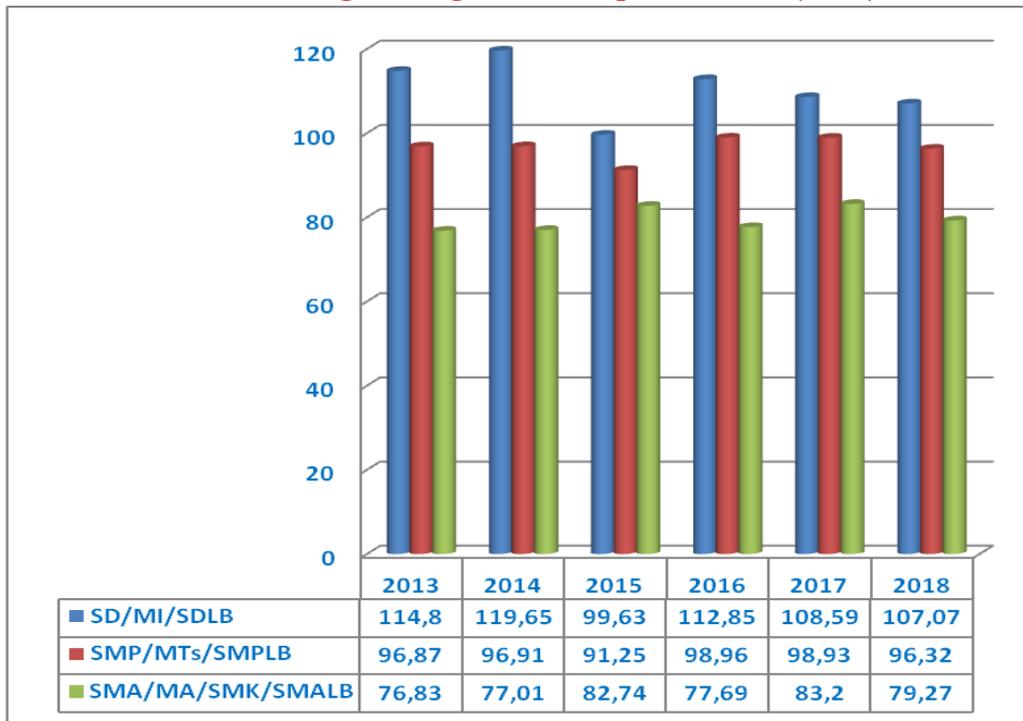
Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana SMA/SMK dan SLB :

- a. Peralatan laboratorium FISIKA SMA untuk 31 SMA di 16 Kabupaten dan 1 Kota;
- b. Pembangunan Jamban Siswa SMA Jamban siswa SMA untuk 8 SMA di 7 Kabupaten;
- c. Pembangunan Laboratorium IPA SMA Laboratorium IPA SMA untuk 19 SMA di 12 Kabupaten dan 1 Kota;
- d. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA RKB SMA sebanyak 35 ruang untuk 24 SMA di 17 Kabupaten;
- e. Pengadaan peralatan media pendidikan SMA berupa Laptop dan LCD proyektor sebanyak 22 paket untuk 16 SMA di 11 Kabupaten dan 1 Kota;
- f. Pembangunan rumah dinas guru sebanyak 2 unit di SMA Negeri Mutis Eban Kabupaten TTU sebagai daerah afirmatif;
- g. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK beserta Perabot sebanyak 73 paket untuk 73 SMK di 21 Kabupaten dan 1 Kota;
- h. Pembangunan Laboratorium IPA SMK sebanyak 18 paket untuk 18 SMK di 9 Kabupaten dan 1 Kota;

- i. Pengadaan Peralatan Praktik Siswa (APS) SMK sebanyak 50 paket untuk 47 SMK di 19 Kabupaten dan 1 Kota;
- j. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK sebanyak 41 ruang untuk 18 SMK di 12 Kabupaten;
- k. Pembangunan Rumah Dinas sebanyak 20 unit rumah dinas untuk 5 SMK di 2 Kabupaten.

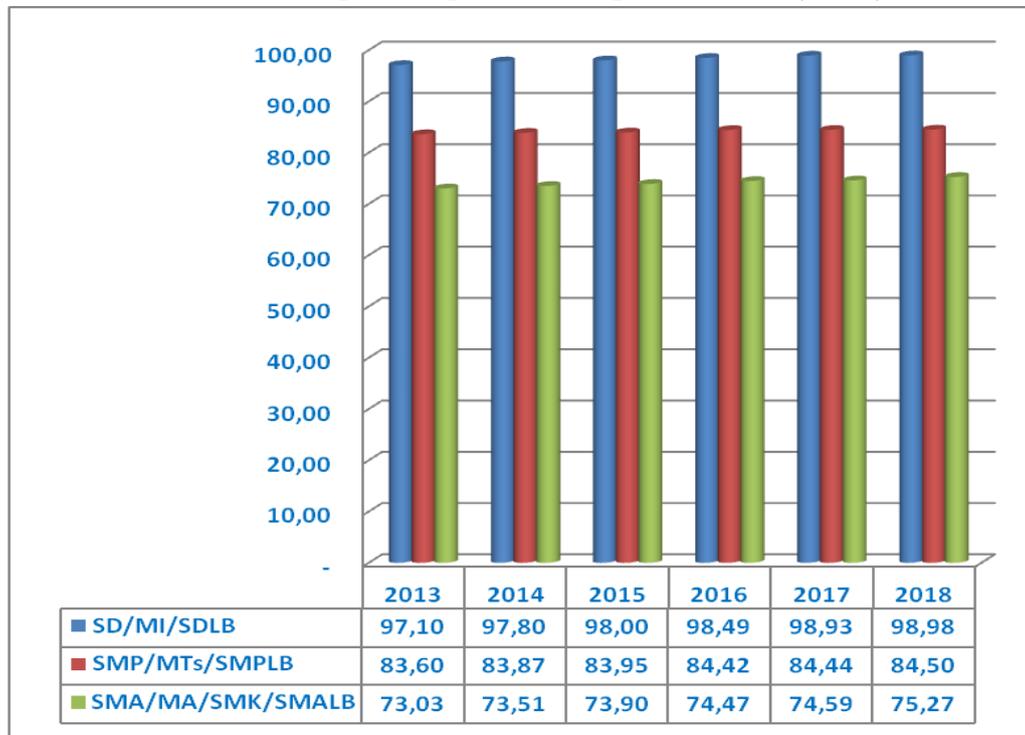
Selain berbagai kegiatan tersebut di atas. kebijakan lainnya sebagai pemerataan persebaran siswa maka dikeluarkannya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yaitu penerimaan siswa baru berdasarkan sistem zonasi. Dengan sistem zonasi maka siswa mau tidak mau harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa lagi mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh tapi menyandang status favorit atau dengan kata lain tidak ada lagi siswa pintar terkumpul di satu sekolah yang selama ini disebut sekolah favorit.

**Grafik 3.4**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)**



Sumber data : Sub Bagian PDE Dinas Pendidikan Provinsi NTT

**Grafik 3.5**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)**



Sumber data : Subag PDE Dinas Pendidikan Provinsi NTT

### c. Rata-Rata Lama Usia Sekolah

Berdasarkan capaian pada tabel 3.1 dapat kita lihat bahwa indikator rata-rata lama usia sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 sebesar 7,71 tahun atau secara rata-rata penduduk Nusa Tenggara Timur hanya mengenyam pendidikan pada kelas 7 atau tahun pertama di SMP/ sederajat.

Indikator yang lebih operasional untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah Guru setiap jenjang pendidikan;
- b. Jumlah Sekolah;
- c. Jumlah Kelompok Belajar Paket A, B dan C.

Selain indikator pendidikan, pencapaian indikator rata-rata lama usia sekolah sangat dipengaruhi oleh faktor lain diluar faktor pendidikan yaitu faktor ekonomi dan sosial budaya.

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya melalui proses pembelajaran di sekolah namun sebagai upaya meningkatkan wawasan serta untuk memotifasi siswa dinas pendidikan juga melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya berupa lomba-lomba yang dilaksanakan baik ditingkat Provinsi maupun tingkat nasional.

## SASARAN 2 :

Tabel 3.2  
Sasaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018		Capaian (%)
							Target	Realisasi	
1	Perentase Penurunan Angka Buta Huruf	%	5.77	8.55	7.27	7.38	4,5	8,10	76,66
2	Jumlah kelompok belajar masyarakat yang dibina	Kel.	20	30	40	-	-	-	-
<b>Rata-rata</b>									

### 1. Perentase Penurunan Angka Buta Huruf

Sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. pemerintah Provinsi tidak lagi menangani pendidikan nonformal (dalam hal ini program pemberantasan buta aksara). Oleh karena itu, informasi terkait dengan pemberantasan buta aksara secara umum dapat diakses melalui BPS. Data yang dapat kami tampilkan sebatas data umum terkait dengan pemberantasan buta aksara. Berdasarkan capaian yang diperoleh terlihat bahwa indikator penurunan angka buta huruf tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti:

- a. Belum adanya program percepatan pemberantasan buta aksara dalam jumlah kelompok yang besar;
- b. Terjadi gejala buta huruf kembali. karena program pendamping yang berkelanjutan sangat minim.

Indikator kinerja kegiatan yang mendukung penuntasan indikator Buta Aksara yaitu:

- a. Jumlah Sanggar Kegiatan Belajar Sebanyak 23;
- b. Jumlah Pusat Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 137;
- c. Jumlah Taman Baca Masyarakat (TBM) sebanyak 8;
- d. Jumlah Lembaga Kursus sebanyak 301.

Melalui pusat belajar mengajar yang dikoordinir oleh sanggar kegiatan belajar mengajar yang berada pada Kabupaten/Kota. masyarakat yang putus sekolah dibina dan mendapatkan pelayanan pendidikan. Namun kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan proses pembelajaran melalui pendidikan luar sekolah. sehingga langkah yang perlu diambil yaitu sosialisasi secara terus-menerus terhadap masyarakat.

## **2. Jumlah Kelompok Belajar Masyarakat yang dibina**

Terkait dengan data jumlah kelompok belajar, data yang ditampilkan merupakan data terakhir tahun 2016. karena sejak tahun 2017 sesuai kewenangan pemerintah Provinsi tidak lagi menangani pendidikan nonformal. Karena itu, penjelasan terkait dengan jumlah kelompok belajar masyarakat dapat dilihat berikut ini.

Yang dimaksud dengan jumlah kelompok belajar masyarakat yang dibina adalah masyarakat putus sekolah yang difasilitasi untuk

mengikuti pelatihan keaksaraan usaha mandiri. Indikator kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama adalah:

- a. Jumlah model pembelajaran bahan ajar:  
Tahun 2016 model kurikulum bahan ajar yang dikembangkan adalah pengembangan model kurikulum PAUD 2013, model kursus teknisi komputer dan model otomotif.
- b. Jumlah pamong belajar yang dilatih;
- c. Jumlah masyarakat yang mengikuti kursus menjahit, salon kecantikan dan berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan langsung dengan dunia usaha mandiri.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut di atas adalah:

- a. Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran;
- b. Pengembangan kompetensi pendidik pendidikan nonformal (PNF).

### SASARAN 3 :

Tabel 3.3  
Sasaran Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Indikator Kinerja	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018		Capaian (%)
						Target	Realisasi	
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Luar Biasa (PLB)	%	17,24	17,29	18,78	18,98	22	19,01	84.41
Rata-rata								

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah **84.41** atau dikategorikan **berhasil**.

Indikator kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama adalah:

- a. Jumlah Sekolah PLB;
- b. Jumlah Siswa PLB;

## c. Jumlah Guru PLB.

Pencapaian target indikator tersebut didukung oleh pencapaian Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut di atas adalah:

- a. Peningkatan kompetensi guru PLB melalui pelatihan-pelatihan pendidikan inklusi;
- b. Peningkatan kompetensi siswa PLB melalui lomba mata pelajaran dan lomba olahraga dan kesenian siswa;
- c. Penguatan manajemen pendidikan khusus dengan musyawarah kepala sekolah.

**SASARAN 4 :**

Tabel 3.4  
Sasaran Peningkatan Tata Kelola Pendidikan yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018		Capaian (%)
						Target	Realisasi	
Frekuensi koordinasi perencanaan, supervisi, monitoring dan evaluasi	∑	47	47	47	47	47	47	100
<b>Rata-rata</b>								<b>100</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran Peningkatan Tata Kelola Pendidikan yang Efektif dan Efisien adalah **100.0%** atau dikategorikan **sangat berhasil**.

Indikator kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja utama adalah:

- a. Frekuensi monitoring dan evaluasi terpadu yang dilakukan;
- b. Jumlah profil pendidikan yang dihasilkan/dicetak;
- c. Frekuensi koordinasi program yang dilakukan di tingkat pusat dan Kabupaten/Kota;
- d. Frekuensi supervise sekolah yang dilakukan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator di atas adalah :

- a. Monitoring evaluasi terpadu;
- b. Pemuktahiran data profil pendidikan;
- c. Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pendidikan dan kebudayaan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota;
- d. Supervisi akademik, manajemen dan kinerja sekolah serta pelaksanaan US/UN.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pagu belanja Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur besumber dari APBD I dan Dekonsentrasi. Adapun akuntabilitas keuangan dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

### **1. ADBD I**

Pada tahun anggaran 2018 alokasi anggaran melalui APBD I sebesar Rp. **1.177.311.719.000.-**. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **702.963.364.000.-** dan Belanja Langsung sebesar Rp. **474.348.355.000.-**, yang terbagi dalam Belanja Langsung Urusan OPD sebesar Rp.**465.202.403.033.-** yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 14 Kegiatan dan Belanja Langsung non urusan sebesar Rp.**9.145.951.967.-** yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 24 Kegiatan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5  
Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan  
Belanja Langsung Tahun 2018

No.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
*	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>702.963.364.000</b>	<b>697.444.402010</b>	<b>99,21</b>
*	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>474.348.355.000</b>	<b>452,021,592,857</b>	<b>95,29</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG NON URUSAN OPD</b>	<b>9.145.951.967</b>	<b>8.251.660.836</b>	<b>90,22</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>7.917.771.967</b>	<b>7.041.752.727</b>	<b>88,94</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.795.000	47.681.289	88,64
2	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	912.600.000	650.363.729	71,26
3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	30.000.000	26.244.000	87,48
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	53.040.000	50.190.000	94,63
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.136.156.000	2.024.234.000	94,76
6	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	610.410.000	568.909.480	93,20
7	Penyediaan alat tulis kantor	566.417.695	566.416.869	100
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	396.900.000	396.632.600	99,93
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	349.735.000	347.953.000	99,49
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.800.000	24.760.000	99,84
11	Penyediaan makan dan minuman	213.600.000	213.599.200	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	70.000.000	69.985.700	99,98
13	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	27.666.000	27.055.000	97,79
14	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	617.230.000	615.696.700	99,75
15	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	124.940.000	124.940.000	100
16	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	1.730.482.272	1287091160	74,38

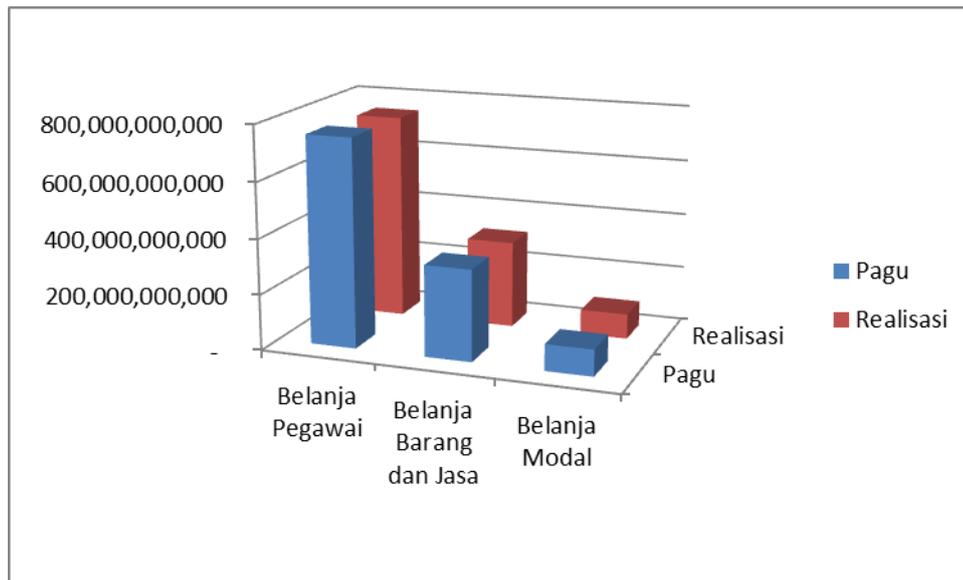
No.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.169.000.000</b>	<b>1.150.729.109</b>	<b>98,44</b>
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	420.950.000	420.639.000	99,93
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	144.750.000	143.250.000	98,96
4	Pengadaan Meubeleur	118.700.000	102.341.500	86,22
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	130.500.000	130.499.550	100
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Operasional	170.000.000	169.916.059	99,95
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	16.800.000	16.800.000	100
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	167.300.000	167.283.000	99,99
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>59.180.000</b>	<b>59.179.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.180.000	59.179.000	100
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM</b>	<b>465.202.403.033</b>	<b>443.769.932.021</b>	<b>95,39</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN</b>	<b>453.197.478.043</b>	<b>432.504.710.627</b>	<b>95,43</b>
1	Rehap Gedung Sekolah	132.831.000.000	125.533.991.038	94,51
2	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	3.933.958.400	3.622.335.731	92,08
3	Pengadaan Peralatan Pendukung UN Online (UNBK)	5.990.120.000	5.926.259.900	98,93
4	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	2.192.016.582	1.876.229.098	85,59
5	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.675.796.000	2.557.965.100	95,60
6	Pembinaan Kelompok Kerja dan Musyawarah guru maple (MGMP)	2.078.100.000	1.887.301.120	90,53
7	Fasilitasi ujian SLB sederajat/setara	1.443.747.500	1.275.963.700	88,38
8	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah	254.188.535.961	243.863.819.044	95,94

No.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
9	Pengembangan system penghargaan dan perlindungan	46.035.200.000	45.966.845.905	96,04
<b>II</b>	<b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.740.213.182</b>	<b>1.665.704.980</b>	<b>95,72</b>
1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Terpadu	1.740.213.182	1.665.704.980	95,72
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN LUAR BIASA</b>	<b>10.264.711.808</b>	<b>9.599.516.414</b>	<b>93,52</b>
1	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.	769.506.708	680.953.714	88,49
2	Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa.	1.257.030.500	1.208.009.500	96,10
3	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SLB	3.201.117.100	3.194.161.000	99,78
4.	Peningkatan mutu Sekolah keberbakatan olahraga	5.037.057.500	4.516.392.200	89,66
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.177.311.719.000</b>	<b>1.149.465.994.867</b>	<b>97,63</b>

Sumber data : Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Laporan Keuangan Desember 2018

Dalam DPA tahun anggaran 2018 dibagi dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu: (1) Pegawai. (2) Barang. (3) Modal. Pos pengeluaran belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan pegawai dan honorarium tenaga kontrak. Pos pengeluaran belanja barang meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari perkantoran, perjalanan dinas dan penunjang kegiatan. Pos pengeluaran belanja modal yaitu pos pengeluaran yang meliputi bantuan dana alokasi khusus (DAK) ke SMA, SMK dan SLB serta kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap.

Alokasi untuk pos-pos pengeluaran tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Berdasarkan gambar tersebut di atas terlihat bahwa alokasi anggaran untuk pos belanja pegawai sebesar Rp. **752.383.094.000** atau **(63.91%)**. Jenis belanja barang dan jasa sebesar Rp. **329.069.248.500** atau **(27.95%)** dan modal sebesar Rp. **95.859.376.500** atau **(8.14%)**. dengan realisasi jenis belanja pegawai sebesar Rp. **745,042,789,010,- (99.02%)** jenis belanja barang dan jasa sebesar Rp. **314.364.883.906,- (95,53%)** dan jenis modal sebesar Rp. **90,058,321,951,- (93,95%)**

## 2. Dekonsentrasi

Total dana dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 adalah Rp.**15.969.367.000** terdiri dari 3 program: (1) Program Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp.**12.282.391.000**; (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.**619.236.000**; (3) Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp.**3.067.740.000**.

Realiasi dana dekonsentrasi tersebut adalah Rp.**15.969.367.000** atau **99,49%**. secara rinci kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6  
Alokasi dan Realiasi Dana Dekonsentrasi  
Tahun 2018

PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		
	ALOKASI	REALISASI	(%)
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH</b>	<b>15.969.367.000</b>	<b>15.884.691.114</b>	<b>99,34</b>
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	4.768.458.000	4.721.622.545	99,02
Pembinaan Sekolah Menengah Atas	4.010.875.000	4.006.515.683	99,89
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	3.537.730.000	3.473.255.056	98,18
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>619.236.000</b>	<b>615.877.830</b>	<b>99,46</b>
Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	619.236.000	615.877.830	99,46
<b>PROGRAM PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>3.067.740.000</b>	<b>3.067.420.000</b>	<b>99,99</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	3.067.740.000	3.067.420.000	99,99
<b>TOTAL</b>	<b>16.950.934.000</b>	<b>16.347.036.679</b>	<b>96,44</b>

Sumber data : Laporan SAI Desember 2018

Dalam DIPA kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Pendidikan antara lain: (1) Pelaksanaan lomba tingkat nasional (OSN. O2SN. FLS2N. LKS. Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia); (2) Bantuan pendidikan siswa/i afirmasi pendidikan menengah sebanyak 150 orang; (3) Peningkatan pengetahuan guru melalui Ujian Kompetensi Guru (UKG).

## **BAB IV.**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2018. Laporan ini menyajikan capaian kinerja yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dengan mencakup 4 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2018. Terdapat 4 Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja antara lain program peningkatan mutu pendidikan, program manajemen pelayanan pendidikan, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan program pendidikan khusus dan layanan khusus.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dalam merupakan tahun kedua Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program dan kegiatan dengan mengelola secara langsung SMA, SMK dan SLB serta mengalami perubahan struktur organisasi. Dinas Pendidikan didukung oleh 5 (lima) unit utama, 12 (duabelas) UPT dan 1 (satu) kelompok jabatan fungsional (Pengawas Sekolah) untuk merealisasikan program dan kegiatan beserta target IKU Tahun 2018 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018.

Keberhasilan atau kegagalan pembangunan di bidang pendidikan pada tahun 2018 ini merupakan dasar bagi Dinas Pendidikan Provinsi NTT untuk menyempurnakan pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan pada tahun-tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Apabila diperlukan, Dinas Pendidikan Provinsi NTT akan mengambil langkah-langkah strategis baik berupa perubahan,

penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin perwujudan tekad dalam melakukan reformasi di bidang kependidikan terutama pada beberapa indikator kinerja yang tidak sesuai lagi dengan kewenangan.

Kupang, Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

**Johanna E. Lisapaly, SH. M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19640110 198903 2 015